

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

Stefanus Ranna

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: stefanusranna27@gmail.com

Abstrak: Sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, maka ditunjuklah Inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah Kota Batu, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsinya dan mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diorganisasikan ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dipilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan dibuat kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan ada tiga program pengawasan Inspektorat Kota Batu yaitu: pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Ketiga program tersebut telah dilalui dengan benar atau sesuai dengan prosedur yang ada. Faktor pendukung adalah sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan faktor penghambat sistem dan prosedur yang belum sesuai, sumberdaya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Kota Batu, serta setiap SKPD Kota Batu yang belum menyeter laporan dan berkas.

Kata kunci: implementasi kebijakan; program pengawasan; reformasi birokrasi

Abstract: *In accordance with the principles of good and clean governance, the Inspectorate as the internal control body of the City of Batu is appointed. It has tasks to supervise the implementation of government affairs in Batu. The purpose of this research was to find out how the Inspectorate carries out its tasks and functions and to know what factors support and hinder the performance of the Inspectorate in carrying out its duties and functions. The research method was done by qualitative research, with primary data sources and secondary data. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants applied a purposive sampling. Systematically the data obtained from interviews, observations and documentation were organized into categories, broken down into units, selected which were important and which would be studied, and withdraw conclusions. The data validity technique was done by triangulation. The results showed that in conducting and implementing the policy there were three supervision programs in the Batu City Inspectorate, namely: examination, testing and investigation. All three programs have been passed correctly or in accordance with the existing procedures. The supporting factors were the adequate facilities and infrastructure, while the inhibiting factors were the systems and procedures that were less appropriate, human resources that were not in accordance with the needs of the Batu City Inspectorate, as well as every Batu City SKPD that has not yet submitted reports and files.*

Keywords: *policy implementation; supervision program; bureaucratic reform*

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada setiap pemimpin di dalam suatu organisasi, sepaham dengan fungsi kebijakan yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Di dalam menjalankan roda pemerintahan dari tingkat Provinsi merupakan tanggung jawab Gubernur, sedangkan di dalam menjalankan roda Pemerintahan di tingkat Kabupaten dan Kota merupakan tanggung jawab Bupati

dan Walikota. Oleh karena keterbatasan kemampuan dari seseorang, untuk dapat mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka pekerjaan dari pimpinan tersebut diserahkan pada pembantunya.

Peran dan fungsi Inspektorat Kota Batu, diatur dalam Peraturan Wali Kota Batu (PERWALI) Nomor 30 Tahun 2013. Dalam Perwali dinyatakan melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Kota Batu, mempunyai fungsi sebagai berikut: merencanakan program-program pengawasan, pemeriksaan, perumusan kebijakan, pengusutan serta pengujian. Tujuan dari pengawasan dalam perumusan adalah untuk menemukan yang salah demi memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Hal ini sudah disadari oleh pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pengawasan baik dari pihak pengawas itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang sedang diperiksa oleh Inspektorat, termasuk masyarakat pada umumnya.

Menurut pendapat Wahab (2008:24), menyebutkan bahwa, implementasi itu mencakup proses menuju tujuan kebijakan dengan langkah administrasi. Implementasi juga dievaluasi dengan sudut pandang yang secara nyata dalam menjalankan dan meneruskan program-program yang sudah disusun dan direncanakan. Menurut Van Meter Van Horn dalam Wahab (2008:34), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintahan maupun dari pihak swasta yang ditujukan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan untuk pencapaian kebijakan. Proses implementasi kebijakan dapat juga dievaluasi dengan membandingkan dan mengukur dari tujuan program kebijakan untuk mendapatkan hasil akhirnya.

Tujuan dari pengawasan untuk dapat meningkatkan nilai-nilai pendayagunaan aparatur Negara dalam menjalankan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan bertujuan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan tatanan birokrasi yang baik pula. Dalam proses menjalankan pengawasan, dengan adanya arus Reformasi yang didorong oleh kritisnya masyarakat saat ini, dengan sederhananya rumusan program pengawasan ini tidaklah cukup untuk menjawab setiap keinginan keluhan masyarakat terhadap pihak Inspektorat untuk memperbaiki dan mengoreksi setiap kesalahan-kesalahan demi memperbaiki tatanan birokrasi pemerintahan di masa yang akan datang untuk menciptakan tatanan reformasi birokrasi yang baik dan bersih dalam melakukan dan mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, maka ditunjuklah Inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah Kabupaten/Kota, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Inspektorat Kota Batu dan pelaksanaan urusan pemerintahan. Yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Namun dalam pengamatan penulis berpendapat bahwa tugas dan fungsi Inspektorat terhadap program pengawasan pada umumnya belum di jalankan sesuai prosedur yang ada, sehingga hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Batu pada program pengawasan.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diterapkan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersamaan dengan menekankan yang bergeser secara dinamis dan penjaminan eksistensi sistem pengawasan pemerintah Daerah itu sendiri. Sehubungan dengan penerapan sistem dan pengembangan serta tepatnya pertanggungjawaban, transparan dan terlegitimasi sehubungan dengan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan yang efektif dan efisien, bersih, dan berdaya guna serta bertanggungjawab dan bebas dari segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan amanat Tap MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Yang menjadi rumusan masalah kenapa dilakukan penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yang dijalankan oleh pihak Inspektorat dalam pemberantasan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap SKPD yang bermasalah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas terhadap program pengawasan Inspektorat pada umumnya dijalankan belum sesuai prosedur sehingga permasalahan tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap fungsi dan program yang telah di laksanakan oleh Inspektorat Kota Batu pada program pengawasan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program pengawasan dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada Inspektorat Kota Batu dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan program pengawasan dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada Inspektorat Kota Batu. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah: Implementasi kebijakan program pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang selanjutnya dibagi dalam tiga elemen. Ketiga elemen tersebut sebagai berikut: pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan anggapan bahwa metode inilah yang tepat untuk menjangkau, menjelaskan, dan menggambarkan segala permasalahan dengan lebih mendalam dan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2014:205) bahwa: “suatu penelitian yang berakar pada latar alamiah sebagai kebutuhan, menjadikan manusia sebagai objek penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, menganalisa data secara induktif, menuntun objek penelitian pada teori yang bersifat deskriptif, dengan lebih fokus mementingkan proses pada studi pengambilan data di lapangan, dalam keabsahan data mempunyai beberapa kriteria untuk memaksa keabsahan data, di dalam rancangan penelitian sudah disepakati dari kedua belah pihak, yaitu peneliti dan subyek.

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh petugas Inspektorat Kota Batu. Metode wawancara ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian dengan menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen peristiwa yang telah belalu berupa tulisan, gambar, dan data yang di dapatkan dari Inspektorat Kota Batu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Pengawasan Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Inspektorat Kota Batu)

a. Pemeriksaan

Implementasi terjadi di tengah-tengah proses kebijakan Inspektorat Kota Batu di dalam menjalankan program pengawasan. Menurut Van Meter Van Horn dalam Wahab (2008:34), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintahan maupun dari pihak swasta yang ditujukan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan untuk pencapaian kebijakan. Proses implementasi kebijakan dapat juga dievaluasi dengan membandingkan dan mengukur dari tujuan program kebijakan untuk mendapatkan hasil akhirnya

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pemeriksaan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) / Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Batu Tahun 2012-2017 terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan atas urusan pemerintahan. Dimana dalam tahapan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, melakukan

pengumpulan data, melakukan pemeriksaan data yang ditemukan, dan melakukan pemeriksaan di lapangan oleh petugas Inspektorat kota Batu dengan berpedoman pada Renja/Renstra yang dilaksanakan oleh tim auditor Inspektorat Kota Batu untuk dapat memastikan adanya masalah yang ditemukan di lokasi/lapangan dan data-data yang berbentuk tulisan.

b. Pengujian

Penerapan kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila dalam melaksanakan pengujian terhadap data yang ada sehingga pekerjaan dapat terselesaikan maka setiap tugas dan pekerjaan sudah dapat dilakukan dengan tepat. Dibuktikan dengan keakuratan data yang diperoleh dan dapat memberikan layanan dengan tepat kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dalam pelaksanaan pengujian terhadap data yang ditemukan di lokasi dan data-data yang berbentuk tulisan oleh tim auditor Inspektorat Kota Batu maka dilakukan pengujian terhadap data-data yang ditemukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, melakukan perbandingan antara data yang terdapat di lokasi dan data-data berbentuk tulisan, dan melakukan pengujian terhadap data yang bermasalah agar tidak terjadi ketimpangan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan atau dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta berpedoman pada Renja/Renstra 2012-2017.

c. Pengusutan

Penerapan kebijakan program pengusutan sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila dari pelaksanaan pengusutan bahwa setiap tugas dan pekerjaan sudah dapat dilakukan dengan benar. Sehingga dapat dikatakan atau dapat dinyatakan bahwa Implementasi Program Pengawasan Kebijakan dalam hal pengusutan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam hasil penelitian pengawai Inspektorat melakukan pemantauan terus-menerus terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan, yang telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian. Dalam hasil penelitian ini bahwa pada tahap pengusutan dilakukan pelaporan kepada Kepala Daerah untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Dalam proses pengusutan juga dilakukan pengecekan dan pengawasan secara terus-menerus oleh pengawai Inspektorat Kota Batu terhadap temuan hasil pemeriksaan dan pengujian, supaya tidak terdapat kesalahan secara masif.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Program Pengawasan Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pada Inspektorat Kota Batu

Aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta meningkatkan produktivitas perangkat pemerintahan Daerah dan usaha lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan program pengawasan, sebagai berikut: Penerapan kebijakan program pengawasan di Inspektorat Kota Batu sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga Tim Auditor dan Pengawai Inspektorat Kota Batu tidak ada hambatan dalam melakukan pekerjaan.

Faktor penghambat di Inspektorat Kota Batu adalah sistem dan prosedur yang belum sesuai dengan amanat Tap MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 Tentang Pelaksanaan untuk mewujudkan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan sumberdaya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Kota Batu untuk menjalankan visi misi

Inspektorat Kota Batu beserta dari setiap SKPD masih banyak yang belum menyetor laporan dan berkas yang menjadi pedoman bagi Tim Auditor Inspektorat Kota Batu untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Hal ini yang menjadi penghambat dalam mendapatkan data yang diinginkan oleh pihak Inspektorat Kota Batu untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap Wali Kota Batu. Berkaitan dengan usaha Pemerintah dalam memperbaiki birokrasi, yang akhirnya dapat disebut sebagai reformasi birokrasi. Pada penerapan pelayanan prima untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang baik maka diupayakan untuk pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap setiap sistem pelaksanaan pemerintahan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sistem pengawasan yang dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari tepatnya waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data yang dilaporkan Inspektorat Kota Batu dengan data yang ada di lapangan. Pemeriksaan sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari ketepatan waktu yang relatif cepat dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Dari segi pengujian, maka proses pengujian yang dijalankan para pengawai dan Kepala Bagian setiap Irbang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai pengusutan, hampir semua proses pengusutan telah terlaksana dengan baik dengan adanya data yang akurat.
2. Penerapan kebijakan program pengawasan di Inspektorat Kota Batu sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. Faktor penghambatnya adalah prosedur yang belum sesuai, serta sumberdaya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Kota Batu beserta dari setiap SKPD masih banyak yang belum menyetor laporan dan berkas yang menjadi pedoman bagi Tim Auditor Inspektorat Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Wali Kota Batu (PERWALI) Nomor 30 Tahun 2013 Peran dan Fungsi Inspektorat Kota Batu.
- Renja/Renstra Tahun 2012-2017 Dokumen Perencanaan Inspektorat Kota Batu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tap MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 Tentang Pelaksanaan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 11 Tentang Mengatasi Tindak Pidana Korupsi.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.